



## ***Minutes of Meeting***

### **Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group**

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021  
Waktu : 09.00 s.d. 11.30 WIB  
Agenda : 1. Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM No.122.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif  
2. Inventarisasi data, informasi, isu dan aplikasi terkait Penyusunan Laporan EITI Indonesia-9  
3. *Feasibility Study* EITI di Indonesia dan *Workplan* EITI untuk *Mainstreaming Data*  
Tempat : Video Conference Zoom Meeting  
Pimpinan Rapat : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Ekonomi  
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM

- 
1. Rapat dilaksanakan berdasarkan undangan Sekjen ESDM, Nomor: 94.Und/DI.02/SJN.D/2021 pada tanggal 26 Juli 2021 dihadiri oleh perwakilan dari :
    - a. Pemerintah Pusat : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan SKK Migas.
    - b. Asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat: Asosiasi Petroleum Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, *Indonesian Mining Association*, PWYP dan IDEA Yogyakarta.
    - c. Pemerintah Daerah: Badan Pengelola Migas Aceh
    - d. World Bank
  2. Tujuan rapat sebagai berikut :
    - a. Menyampaikan tugas Forum MSG, standar data, mekanisme pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan laporan EITI berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.122.K/HK.02/MEM.S/2021 serta status konfirmasi perwakilan keanggotaan Forum MSG kepada Sekretariat EITI Indonesia (per tanggal 30 Juli 2021).
    - b. Permohonan data sektor migas dan minerba serta pendapatan negara dan pendapatan daerah yang dicatat oleh Pemerintah, pokok pembahasan terhadap permasalahan industri ekstraktif pada sektor pertambangan serta

*mainstreaming data* yang dapat dituangkan dalam laporan EITI ke 9.

c. Penyampaian hasil *Feasibility Study* EITI di Indonesia serta *Workplan EITI Mainstreaming Data* oleh World Bank.

3. Kementerian ESDM menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Saat ini formalitas dari forum MSG sudah dimulai dan legalitas keanggotaan Forum MSG sedang diproses.
- b. Data industri ekstraktif sudah terintegrasi, tersebar di beberapa aplikasi Kementerian/Lembaga terkait.
- c. Pengumpulan data dari pelaporan perusahaan industri ekstraktif akan disampaikan *dalam e-reporting / reformat system kuesioner* agar lebih mudah.
- d. Sekretariat EITI Internasional akan memberikan bantuan teknis revidi terhadap *workplan* EITI Indonesia.
- e. Rekonsiliasi data pada industri ekstraktif untuk tahun ini belum dapat dilakukan namun validasi terhadap pengumpulan data dari Pemerintah akan divalidasi langsung ke unit terkait.
- f. Format yang ada di LKPP dapat dikapitalisasi dengan mengikuti kualitas pelaporan.
- g. Perlu adanya penjelasan tentang *time difference* atau perbedaan cut off time pelaporan sehingga tidak menimbulkan perbedaan data.
- h. Forum *open ownership transparency* yang merupakan program dari Sekretariat EITI Internasional akan diskusikan lebih lanjut.
- i. Diharapkan K/L yang belum memberikan konfirmasi nama perwakilan dalam Forum MSG untuk segera menyampaikan kepada Sekretariat EITI Indonesia (cq. KESDM)

4. World Bank menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan *Feasibility Studi* adalah untuk mengetahui ketersediaan data dalam upaya implementasi *mainstreaming* EITI berdasarkan Standar EITI 2019.
- b. Untuk mencapai *full-mainstreaming* antara 2-3 tahun kedepan, World Bank mengusulkan untuk merevisi dan memberikan *feedback* terkait dengan *feasibility*; membentuk *working grup* untuk menyusun *draft roadmap mainstreaming*, kemudian forum MSG yang lebih besar untuk merevisi dan memberikan *feedback* dari *draft* tersebut, sehingga tahap selanjutnya studi dan *roadmap* tersebut dapat dipublikasikan ke dalam EITI Internasional dan menjadi bagian *partial mainstreaming application* untuk EITI Indonesia.

5. **Pertanyaan dan Tanggapan dari Peserta Rapat**

• **Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan**

- a. Data yang dapat diperoleh dari DJPK adalah data yang terkait Dana Bagi Hasil, yakni:

- 5 provinsi penerima DBH migas terbesar
  - 5 provinsi dengan kabupaten penerima DBH migas terbesar
  - 5 provinsi penerima DBH minerba terbesar
  - 5 provinsi dengan kabupaten penerima DBH migas terbesar
- b. Data LKPP PDRB Migas akan disediakan oleh Ditjen Anggaran.
- c. Data PDRB Minerba dapat dikonfirmasi pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan
- **SKK Migas**  
SKK Migas siap untuk melaporkan data tahun 2020.
  - **Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan**
    - a. Data per wajib pajak cukup sulit untuk dilaksanakan, apabila per sektor dimungkinkan untuk pelaporannya dan data tersebut ada di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak.
    - b. Melakukan *benchmark* migas guna mempercepat laporan EITI.
  - **Ditjen Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan**
    - a. DJA akan menyiapkan data nomor pendapatan minyak bumi, gas bumi, minyak mentah (DMO), pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas, PPN *reimbursement* migas PDRB migas, pendapatan minerba subsektor per provinsi, dan PNBPN sektor minerba.
    - b. DJA tidak mempunyai data PPh badan untuk minerba dan pajak bumi dan bangunan minerba.
  - **Publish What You Pay (PWYP) Indonesia**
    - a. Konsep satu data, mengintegrasikan sistem, yang bisa terlihat berbeda namun sama sehingga konsep satu data harus lebih diperkuat lagi sebelum diintegrasikan sehingga tidak ada perbedaan masalah hanya karena perbedaan waktu *updating* data.
    - b. *Significant barrier* yang disampaikan pada *Feasibility Study* oleh World Bank perlu ada diskusi khusus, misalnya pembahasan kontrak/BO. Diharapkan pembahasan kontrak/BO lebih konkrit / isu spesifik dengan diskusi detail teknis bersama pihak terkait tanpa perlu menghadirkan narasumber umum, karena pembahasan kontrak dan BO merupakan isu lama.
    - c. Diharapkan juga ada kerja sama program dari dilakukan oleh Asosiasi/K/L lainnya dengan Sekretariat EITI Indonesia. (salah satu contoh telah dilakukan sinergitas program PWYP dengan Sekretariat EITI Indonesia Kegiatan Forum Multipihak Provinsi Kaltim).
  - **Indonesian Mining Association (IMA)**
    - a. Pengumpulan data dari industri ekstraktif dimulai di minggu I bulan Agustus hingga minggu II bulan Agustus

- b. Untuk pengumpulan data dari industri ekstraktif, Asosiasi dapat mendukung untuk membantu mempercepat pelaporan kuesioner dari industri ekstraktif.
  - c. Akan dilakukan pertemuan dan diskusi teknis untuk membahas format dan pelaporan data dari industri ekstraktif
6. Secara umum Forum MSG menyepakati:
- a. Data yang akan disampaikan pada laporan adalah data yang audited.
  - b. Standar klasifikasi pendapatan negara disesuaikan dengan LKPP
  - c. Periode data yang disampaikan pada Laporan EITI ke 9 adalah data hingga tahun 2020. Kuesioner untuk perusahaan industri ekstraktif akan dimulai pada Minggu ke II Agustus 2021 yang sebelumnya akan dilakukan koordinasi terkait template data perusahaan pada Forum MSG
  - d. Dukungan peran serta aktif dari Asosiasi untuk meningkatkan kepatuhan laporan dari industri ekstraktif.
  - e. Perlu dijadwalkan pembahasan lebih spesifik topik dan pemetaan indikatif *timeline significant barrier* dengan Forum MSG.
  - f. Para perwakilan dari Forum MSG diharapkan dapat segera memberikan review dan *feedback* terhadap *Mainstreaming Roadmap* dan *Mainstreaming Feasibility Study* dari World Bank yang ditargetkan pada pertengahan Agustus.
  - g. Diharapkan para produsen data (unit/K/L terkait/stakeholder) pada penyusunan laporan EITI dapat segera mengirimkan datanya kepada Sekretariat EITI melalui email: sekretariat-eiti@esdm.go.id.

Note:

Data dukung dapat diakses pada <https://bit.ly/3jgzhOy>

**Monitoring**  
**Keanggotaan Forum Multi Stakeholder Group**

**Status : Menunggu Konfirmasi**

	<b>Instansi/K/L/Pemda/ /Asosiasi/ LSM</b>
1	Ditjen Pajak
2	Ditjen Perbendaharaan
3	Badan Kebijakan Fiskal
4	Kedeputian Bidang Akuntan Negara, BPKP
5	Sekretaris Daerah dari Pemda Prov. Penghasil Industri Ekstraktif Bidang Migas (3 orang)
6	Sekretaris Daerah dari Pemda Prov. Penghasil Industri Ekstraktif Bidang Minerba (3 orang)

Data: Jumat, 30 Juli 2021, pukul 16.30 WIB

**Monitoring**  
**Permohonan Data pada Laporan EITI ke 9**

**Status : Data Sudah Diterima Sekretariat EITI**

	<b>Produsen Data (Unit/K/L terkait)</b>
1	Ditjen Migas

Data: Jumat, 30 Juli 2021, pukul 16.30 WIB